

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG INGATKAN: MANIPULASI HASIL PSU DIANCAM SANKSI BERAT

BANDAR LAMPUNG, 01 Juni 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung terus memperkuat langkah mitigasi pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian dari program prioritas nasional Bawaslu tahun 2025. Program ini merupakan upaya strategis untuk memastikan daftar pemilih yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.

Langkah pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dan terukur terhadap proses pembaruan data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagai langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan PDPB, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan berbagai inisiatif strategis. Beberapa di antaranya meliputi konsolidasi data hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir, serta penyusunan peta wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih. Pemetaan ini penting untuk mengidentifikasi area yang berpotensi mengalami permasalahan seperti pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), atau warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih.



Selain itu, koordinasi intensif dengan KPU Provinsi Lampung dan dinas/instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), lembaga

pemasyarakatan, serta aparat penegak hukum juga dilakukan untuk memperkuat validitas data kependudukan.

Bawaslu Lampung juga membuka posko pengaduan masyarakat baik secara offline di kantor Bawaslu maupun secara online melalui kanal digital resmi. Posko ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan permasalahan data pemilih, seperti pemilih yang tidak terdaftar, data ganda, atau pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar.

Selain melakukan publikasi hasil pengawasan PDPB, Bawaslu Provinsi juga aktif melakukan supervisi dan monitoring ke jajaran kabupaten/kota untuk memastikan seluruh langkah pencegahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu melakukan pendekatan yang lebih operasional dan berbasis wilayah. Upaya yang dilakukan antara lain inventarisasi data hasil pengawasan Pemilu sebelumnya, penyusunan peta wilayah rawan PDPB, serta koordinasi dengan berbagai pihak seperti KPU Kabupaten/Kota, Disdukcapil, Pengadilan Negeri, Lapas/Rutan, TNI/Polri, hingga pemerintah kecamatan dan desa.

Koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci utama agar seluruh pergerakan data kependudukan, baik penambahan pemilih baru, pemilih pindah domisili, hingga penghapusan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, dapat terpantau dengan baik.



Bawaslu Kabupaten/Kota juga diwajibkan untuk membuka posko pengaduan masyarakat dan melaksanakan kerja sama dengan lembaga atau pihak terkait dalam rangka pengawasan PDPB. Tak hanya itu, jajaran Bawaslu di daerah juga diimbau untuk secara aktif menyampaikan imbauan tertulis kepada KPU setempat agar pelaksanaan PDPB berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Lampung menilai bahwa keberhasilan PDPB tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan pengawas pemilu, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi prinsip utama dalam proses ini.

Melalui publikasi hasil pengawasan, masyarakat dapat memantau perkembangan pelaksanaan PDPB dan turut memberikan masukan apabila menemukan adanya kejanggalan dalam daftar pemilih. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap integritas data pemilih, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam memastikan hak pilihnya terjamin.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Data pemilih yang akurat adalah kunci utama bagi terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Karena itu, Bawaslu Lampung berkomitmen memperkuat pengawasan di setiap tahapan, terutama pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” ujar Iskardo.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan.



“Kami mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk turut serta mengawasi proses pembaruan data pemilih. Jika ada temuan atau dugaan ketidaksesuaian data, segera laporkan ke posko pengaduan Bawaslu terdekat. Pengawasan bukan hanya tugas lembaga, tetapi tanggung jawab bersama demi menjaga kedaulatan suara rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iskardo menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. “Kami juga terus menjalin kerja sama dengan KPU, Disdukcapil, aparat keamanan, dan berbagai pihak lain untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilih atau justru terdaftar lebih dari satu kali. Pencegahan dini menjadi langkah utama kami dalam memastikan daftar pemilih yang bersih dan akuntabel,” tutupnya.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttt)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG BERKOMITMEN PERKUAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA NON TAHAPAN

BANDAR LAMPUNG, 10 Juni 2025 - Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung telah berakhir. Para pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telah dilantik dan mulai menjalankan amanah rakyat di berbagai Kabupaten dan Kota hingga Provinsi. Meski demikian sampai saat ini masih terdapat 1 dari 15 daerah di Lampung yang berproses penyelesaian sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yakni Kabupaten Pesawaran atas hasil Pemungutan Suara Ulang 24 Mei 2025. Di tengah berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada ini, muncul pertanyaan dari publik: "Apa kerja Bawaslu setelah tahapan selesai?"

Menjawab hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa meskipun tahapan pemilu atau pilkada telah berakhir, Bawaslu tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat sejumlah tugas non-tahapan yang tetap harus dilaksanakan Bawaslu dalam menjaga marwah demokrasi.

Dalam pasal 96, 100, dan 104, disebutkan bahwa Bawaslu tetap memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU di semua jenjang. Selain itu, pada pasal 94, 98, 102, dan 105 dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pengawasan partisipatif, baik di masa tahapan maupun non tahapan pemilu.



Merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, disebutkan bahwa pengawasan partisipatif dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melalui berbagai program seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, Kampung Pengawasan, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Iskardo P. Panggar menyampaikan bahwa meski tahapan sudah selesai dan anggaran terbatas, Bawaslu tetap harus eksis menjalankan tugas dan fungsinya. “Bawaslu Kabupaten/Kota di instruksikan melalui Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 4/PM.03/LA/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 untuk tetap melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif yang bersifat non-budgeter. Ini penting agar eksistensi lembaga tetap terjaga dan proses pendidikan demokrasi terus berjalan,” ujar Iskardo.

Selain itu, Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga dan membangun komunikasi yang lebih solid di lingkungan pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung tengah mempersiapkan sebuah program olahraga bertajuk “Demokrasi Sehat”. Program ini menjadikan olahraga, khususnya bulu tangkis melalui wadah PB BALUNG, sebagai sarana utama mempererat silaturahmi, baik di internal Bawaslu maupun dengan institusi eksternal atau lembaga lainnya juga berkenaan dengan persepsi serta curah pendapat arah demokrasi di Lampung yang akan datang. Selain bulu tangkis, Bawaslu Lampung juga membentuk tim mini soccer dan futsal sebagai bagian dari program tersebut.



Kemudian Ia menegaskan bahwa kegiatan pengawasan partisipatif minimal dilakukan dua kali dalam sebulan. Salah satu sasarannya adalah calon pemilih pemula seperti siswa SLTA sederajat atau mahasiswa, menyesuaikan dengan ketersediaan pihak sekolah atau kampus.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir turut menegaskan bahwa meskipun keterbatasan anggaran, pengawas pemilu harus tetap menjalankan tugas. “Kita menjalankan fungsi

pengawasan, meski tanpa anggaran, kegiatan pengawasan partisipatif harus tetap dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan,” ujarnya.

HBM menilai bahwa kegiatan pengawasan partisipatif bersifat fleksibel dan tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Kegiatan cukup dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah atau kampus terdekat, dengan pendekatan yang kreatif dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Bawaslu harus menunjukkan eksistensinya. Kita bisa mulai dari lingkungan yang memang ada di sekitar kita, tidak perlu muluk-muluk. Yang penting kegiatan ini berjalan, terdokumentasi dengan baik, dan punya dampak terhadap pendidikan demokrasi di masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mendorong agar Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki target konkret terkait pendidikan politik di SMA/SLTA sederajat, termasuk menjalin sinergi dengan instansi/lembaga di daerah masing-masing.

“Kegiatan ini kalau bisa dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, sehingga bisa diluncurkan bersama-sama dan dipublikasikan secara luas ke masyarakat,” pungkasnya.



Dengan semangat kolaboratif dan efisiensi, Bawaslu Lampung terus mendorong agar pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar menyentuh akar partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi di masa non-tahapan.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

**REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA BULAN JUNI
BAWASLU SE-PROVINSI LAMPUNG**

PROVINSI/KAB/KOTA	BULAN JUNI	KEGIATAN
Bawaslu Provinsi Lampung	2	1. Diskusi dan Bedah Buku pada pengembangan Pojok Pengawasan; dan 2. Koordinasi dengan Stakeholders
Bawaslu Kota Bandar Lampung	2	1. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan 2. Sosialisasi Pengawas Partisipatif ke Partai-partai
Bawaslu Kota Metro	2	1. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan 2. Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Pesawaran	1	Sosialisasi Pengawas Partisipatif ke Ormas dan OKP
Bawaslu Kab. Pringsewu	1	Podcast pada pengembangan pojok pengawasan
Bawaslu Kab. Tanggamus	2	1. Kerjasama dengan Stakeholder; dan 2. Sosialisasi Pengawas Partisipatif pada kegiatan Jambore Saka Adhyasta
Bawaslu Kab. Pesisir Barat	2	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Lampung Timur	1	Forum Warga kepada PKK/Posyandu
Bawaslu Kab. Lampung Selatan	2	1. Diskusi publik pada pengembangan Pojok Pengawasan; dan 2. Forum Warga kepada Nelayan
Bawaslu Kab. Lampung Tengah	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Lampung Utara	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Lampung Barat	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Way Kanan	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Tulang Bawang	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA
Bawaslu Kab. Mesuji	1	Sosialisasi ke pemilih pemula sekolah SMA/SLTA



SIARAN PERS

SUARAMU MENENTUKAN MASA DEPAN: BAWASLU LAMPUNG AJAK MASYARAKAT GUNAKAN HAK PILIH DAN AWASI PEMILU

BANDAR LAMPUNG, 13 Juni 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk sadar akan arti penting satu suara dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Melalui kampanye edukatif bertajuk “Suara Kamu Sangat Berarti”, Bawaslu menegaskan bahwa setiap suara yang diberikan masyarakat memiliki nilai besar dalam menentukan arah masa depan bangsa dan daerah.

Pesan ini menjadi pengingat bagi seluruh warga Lampung bahwa partisipasi aktif dalam Pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan bentuk nyata kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam demokrasi, setiap suara memiliki bobot yang sama, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik pemilih.

“Setiap suara adalah wujud kedaulatan rakyat. Tidak ada suara yang sia-sia dalam demokrasi. Dari suara yang jujur dan berintegritas lahir pemimpin yang amanah dan pemerintahan yang kuat,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar.

Bawaslu Lampung melalui berbagai saluran komunikasi publik juga mengingatkan bahwa suara rakyat memiliki daya ubah yang besar. Layaknya tetesan air yang menciptakan riak, suara satu orang mampu berkontribusi pada perubahan besar ketika berpadu dengan suara lainnya. Pemilu bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi bagaimana proses itu dijalankan dengan jujur, adil, dan partisipatif.

“Suara kamu adalah cerminan aspirasi rakyat. Jika bersatu, suara-suara itu membentuk gelombang besar yang memperkuat demokrasi di Lampung dan



Indonesia. Jangan remehkan kekuatan satu suara, karena sejarah politik kita membuktikan bahwa satu suara bisa menentukan arah perubahan,” tambah Iskardo.

Dalam momentum menjelang Pemilu dan Pilkada serentak, Bawaslu Lampung terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat menjadi Pemilih Cerdas—yakni mereka yang tahu haknya, memahami proses, serta ikut aktif mengawasi. Bawaslu mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks, politik uang, maupun tekanan dari pihak manapun.

“Menjadi pemilih cerdas berarti tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga ikut menjaga integritas proses Pemilu. Masyarakat harus berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran ke Bawaslu,” tegas Iskardo.

Bawaslu Lampung juga membuka saluran pengaduan publik melalui situs resmi lampung.bawaslu.go.id dan kanal media sosial resmi Bawaslu Lampung. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran dengan mudah, cepat, dan tetap terjamin kerahasiaannya.

Melalui kampanye ini, Bawaslu juga mengajak seluruh warga Lampung untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara mendatang. Dengan tagline “Ayo ke TPS, Jadikan Suaramu Penentu!”, Bawaslu berharap tingkat partisipasi pemilih dapat terus meningkat, sekaligus menguatkan legitimasi hasil Pemilu dan Pemilihan.



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

“Pemilu yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga masyarakat. Mari sama-sama kita wujudkan Pemilu yang bersih, damai, dan bermartabat,” tutup Iskardo P. Panggar.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

WASPADAI CIRI-CIRI KONTEN HOAKS! BAWASLU LAMPUNG AJAK MASYARAKAT LEBIH CERDAS MENYARING INFORMASI

BANDAR LAMPUNG, 20 Juni 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk semakin waspada terhadap penyebaran berita bohong atau hoaks, terutama menjelang tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan datang. Beredarnya informasi palsu di berbagai platform media sosial dinilai berpotensi menimbulkan disinformasi dan memecah belah masyarakat.

Hoaks sering kali dibuat dengan tujuan tertentu—baik untuk membentuk opini publik, menjatuhkan pihak tertentu, atau bahkan menggiring persepsi masyarakat terhadap isu politik tertentu. Karena itu, Bawaslu menilai penting bagi seluruh warga untuk memahami ciri-ciri konten hoaks agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Bawaslu Lampung merangkum sedikitnya sepuluh ciri utama dari konten hoaks yang marak beredar di ruang digital :

1. Informasi yang Tidak Terverifikasi

Hoaks biasanya memuat informasi yang belum diverifikasi kebenarannya dan tidak memiliki bukti pendukung yang jelas.

2. Pesan Sepihak dan Tidak Berimbang

Isi berita sering hanya memaparkan satu sisi cerita, tanpa konfirmasi dari pihak lain.

3. Judul Provokatif dan Sensasional

Menggunakan kata-kata yang berlebihan untuk menarik perhatian pembaca tanpa memperhatikan kebenaran isi.



4. Mencatut Nama Tokoh atau Lembaga
Sering menggunakan nama tokoh terkenal atau lembaga resmi untuk menimbulkan kesan kredibel.
5. Menggunakan Data dan Argumen yang Tidak Akurat
Data yang disajikan sering kali tidak relevan, tidak valid, atau bahkan direkayasa.
6. Cenderung Menyudutkan Pihak Tertentu
Hoaks biasanya memiliki tujuan untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pihak tertentu.
7. Menimbulkan Kecemasan dan Ketakutan
Isi berita bisa memicu kepanikan atau permusuhan di masyarakat.
8. Menyembunyikan Fakta dan Data Penting
Informasi penting sering disembunyikan agar pembaca tidak mengetahui konteks sebenarnya.
9. Menciptakan Kesan Ilmiah
Penggunaan istilah ilmiah palsu atau argumen yang seolah logis untuk meyakinkan pembaca.
10. Manipulasi Gambar dan Video
Hoaks sering memakai foto atau video hasil editan untuk memperkuat klaim palsu.

Menurut Bawaslu Lampung, pemahaman terhadap ciri-ciri ini menjadi langkah awal agar masyarakat tidak mudah termakan oleh provokasi atau informasi palsu yang beredar di dunia maya.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa hoaks tidak hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak integritas proses demokrasi. “Penyebaran hoaks, terutama di masa tahapan pemilu atau pilkada, bisa mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ini adalah ancaman serius bagi kualitas demokrasi kita,” ujarnya.



Ia menambahkan bahwa Bawaslu terus mendorong kolaborasi lintas pihak, termasuk dengan lembaga pemerintah, media massa, dan masyarakat sipil, dalam upaya menangkal penyebaran hoaks. “Kami berharap masyarakat Lampung bisa menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Saring sebelum sharing,” tegas Iskardo.

Sebagai bentuk komitmen menjaga ruang digital yang sehat, Bawaslu Lampung akan terus memperkuat program literasi digital dan edukasi publik di berbagai daerah. Kegiatan seperti sosialisasi anti-hoaks, kampanye digital bersih, dan pelatihan pengawasan partisipatif akan digencarkan menjelang tahapan Pilkada 2025.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Peran masyarakat dalam menjaga kebenaran informasi sangat penting. Mari bersama kita lawan hoaks dengan data, verifikasi, dan sikap kritis,” lanjut Iskardo.

Bawaslu Lampung juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membagikan berita yang belum jelas sumbernya, terlebih jika mengandung unsur provokasi atau fitnah. Penyebaran hoaks bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga bisa berimplikasi hukum jika menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

“Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika masyarakat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana edukasi dan persatuan, bukan tempat penyebaran kebencian,” tutup Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)